

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BANDUNG JAWA BARAT

Nandha Annisa Siti Meyra

NPP. 31.0379

*Asal Pendaftaran Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat  
Program Studi Studi Kebijakan Publik*

E-mail: nandhaannisa1205@gmail.com

Dosen Pembimbing: Nur Ichsan Amin, SH., M.Si

## ABSTRACT

**Background:** Waste has become a problem in everyday life, so the Environmental Agency must devise various programs to help tackle waste so that the increase in the amount of waste does not continue. **Objective:** The aim of this research is to understand the implementation of policies and factors in waste management by the Environmental Agency in Bandung City, West Java Province. **Method:** This thesis uses descriptive research methods with a qualitative approach. The research methods used are observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques include data collection, data reduction, data presentation, and data verification. **Results:** The results of this research show that the content of the policy is conveyed clearly, and it is known that the content of the policy is conveyed quite clearly. The efforts undertaken by the Environmental Agency of Bandung City, West Java Province, include providing socialization and guidance to the community regarding waste using social media, as well as going directly to the field to provide direct guidance and monitor environmental cleanliness and waste distribution in the Bandung City area, West Java Province. **Conclusion:** The output obtained in this research is that the waste management policy content by the Environmental Agency in Bandung City is conveyed quite clearly to the community. Suggestions from researchers are for the Environmental Service in the City of Bandung, West Java to further increase public awareness by providing regular coaching and outreach about waste management and the importance of environmental cleanliness, as well as for the government to provide adequate facilities by building a Waste Bank and increasing the number of small, easy-to-use TPS. accessible to the community.

**Keywords:** Government Program, Policy Implementation, Waste Countermeasures, Waste Management

## ABSTRAK

**Latar Belakang:** Sampah menjadi masalah dalam kehidupan sehari-hari, maka Dinas Lingkungan Hidup harus menyusun berbagai macam program yang dapat membantu penanggulangan sampah agar peningkatan jumlah sampah tidak terjadi secara berkelanjutan. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan dan faktor dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis data dengan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. **Hasil:** Hasil penelitian ini menunjukkan isi kebijakan disampaikan dengan jelas dapat diketahui bahwa isi kebijakan disampaikan dengan cukup jelas. Upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dengan

memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan sampah dengan menggunakan media sosial serta turut serta turun langsung ke lapangan untuk memberikan pembinaan langsung dan memantau kebersihan lingkungan dan penyebaran sampah di wilayah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. **Kesimpulan:** Output yang diperoleh pada penelitian ini adalah penelitian ini menunjukkan bahwa isi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bandung disampaikan dengan cukup jelas kepada masyarakat. Saran dari peneliti agar Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bandung Jawa Barat lebih meningkatkan lagi kesadaran masyarakat dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi yang rutin tentang penanggulangan sampah dan pentingnya kebersihan lingkungan, serta pemerintah agar dapat memberikan fasilitas yang memadai dengan membangun Bank Sampah dan memperbanyak TPS kecil yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

**Kata Kunci:** Impelementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Program Pemerintah, Penanggulangan Sampah

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sampah menjadi masalah yang semakin signifikan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, yang berkontribusi pada peningkatan volume sampah. Sampah tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat tetapi juga kesehatan, karena lingkungan yang penuh sampah dapat menyebabkan penyakit (Khairunnisa et al., 2019). Pemerintah Indonesia merespons masalah ini dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta mengubah limbah menjadi sumber daya melalui prinsip-prinsip seperti tanggung jawab, kelestarian, dan gotong royong. Pada setiap tahun timbunan sampah di Indonesia itu mengalami peningkatan yang cukup drastis dari tahun 2019 ke tahun 2020 sehingga mengalami peningkatan timbunan sampah tiap tahunnya sebesar 2,865,131 ton. Namun, pada tahun 2021 timbunan sampah tersebut mengalami penurunan yang cukup drastis juga sebesar 2,760,129 ton. Dengan peningkatan dan penurunan jumlah timbunan sampah yang cukup drastis tersebut dapat kita lihat bahwa pada tahun 2019 terdapat suatu faktor yang mempengaruhi peningkatan timbunan sampah tersebut yakni ketersediaan TPS (Tempat Pembuangan Sampah) dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Data menunjukkan bahwa timbunan sampah di Indonesia terus meningkat setiap tahun, meskipun ada fluktuasi yang signifikan. Misalnya, dari 2019 ke 2020, sampah meningkat drastis, tetapi pada 2021 mengalami penurunan yang cukup besar. Penyebab utama peningkatan sampah adalah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Masyarakat memiliki keterkaitan dalam menanggulangi sampah. Masyarakat berperan penting dalam mengatasi peningkatan jumlah sampah yang ada. Masyarakat Kota Bandung harus dapat bekerjasama dengan instansi dan pihak terkait untuk dapat menanggulangi peningkatan jumlah sampah yang tersebar di Kota Bandung. Contohnya, pertumbuhan penduduk di Kota Bandung dari 2019 hingga 2021 menunjukkan peningkatan produksi sampah, dengan total timbunan mencapai 1.683 ton per hari pada 2023. Pemerintah Kota Bandung hanya memiliki satu Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) yang mengalami overcapacity, menunjukkan perlunya pengelolaan sampah yang lebih efektif. Untuk mengatasi masalah sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung telah meluncurkan berbagai program seperti "Kang Pismang" untuk edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah, serta program bank sampah untuk mengelola sampah kering yang memiliki nilai ekonomi. Regulasi tentang bank sampah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, yang berperan penting dalam mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA. Upaya-upaya ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola



sampah dan menjaga kebersihan lingkungan.

## **1.2. Kesenjangan Masalah**

1. Penyebab meningkatnya sampah juga dapat dikarenakan penduduk yang selalu mengalami pertumbuhan setiap tahun. Penduduk yang semakin ramai membuat jumlah sampah mengalami peningkatan sebab masyarakat yang menghasilkan sampah juga cukup banyak. Hal ini didukung dengan data pertumbuhan penduduk. Masalah sampah terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk, yang berdampak negatif pada kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Faktor penghambat implementasi kebijakan yang berkaitan tentang sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Provinsi Jawa Barat diantaranya kurangnya rasa peduli masyarakat dengan kebersihan lingkungan, minimnya pengetahuan masyarakat terkait manfaat bank sampah, dan kurangnya kerja sama masyarakat untuk dapat mengatasi masalah sampah secara bersama-sama. Kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk program Kang Pisman tersebut dan Kurang memadai fasilitas untuk pengangkutan sampah dari setiap daerahnya menuju TPA Regional Sarimukti.

2. Upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dengan memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan sampah dengan menggunakan media sosial serta turun serta turun langsung ke lapangan untuk memberikan pembinaan langsung dan memantau kebersihan lingkungan dan penyebaran sampah di wilayah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Penguatan kerjasama yang baik antara semua pihak baik dari pihak pemerintah maupun dengan pihak swasta. Dan mengevaluasi berkala terhadap jumlah timbunan sampah.

Meskipun pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, tantangan seperti ketidakterediaan lahan yang memadai dan peningkatan volume sampah yang signifikan masih ada. Data menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi peningkatan timbunan sampah setiap tahun, sementara Kota Bandung, dengan produksi sampah harian yang tinggi, hanya memiliki satu TPA regional yang kini dalam kondisi overload. Dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan mendorong perlunya pengelolaan yang lebih efektif. Inisiatif seperti program "Kang Pismang" dan bank sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung adalah upaya untuk mengatasi masalah ini, namun tantangan besar dalam manajemen dan implementasi tetap ada, sehingga penelitian lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bandung sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya adalah penelitian yang sudah dilakukan dan dikenalkan penulis untuk melakukan pengkajian masalah yang diangkat. Penelitian sebelumnya digunakan sebagai referensi penulis untuk acuan pada penelitian. Penelitian pertama yaitu oleh Mokodompis et al. (2019) dengan judul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Manado" mengungkapkan bahwa Faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di kota manado adalah terkait dengan kesadaran masyarakat yang masih membuang sampah di sungai. Kedua terkait dengan sarana dan prasarana misalnya bank sampah dan TPS 3R (Reuse, Reduce, Recycle) dan terakhir penegakan hukum kurang maksimal. Selanjutnya, Hastuti et al. (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan" menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Perda No. 01 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan sudah berjalan sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan isi kebijakan, serta masih ada ketidaksesuaian yang didapat dari hasil pelaksanaan kebijakan. Cahyadi et al. (2017) dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah di Kabupaten Purbalingga" menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kabupaten Purbalingga, sesuai dengan tingkat kepatuhan, kelancaran fungsi, kinerja dan

dampak dari bank sampah, masih belum menunjukkan hasil yang optimal sehingga tidak dapat dianggap berhasil. Selanjutnya, dalam penelitian berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang Menurut Perda No 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah” oleh Yulistia et al. (2015) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah belum sepenuhnya berhasil untuk mengurangi jumlah timbulan sampah yang ada.

Abror, M. D., & Probojati, R. T. (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Model MSN Approach dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah” Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek mentality approach aspek perilaku, sikap, dan tanggungjawab dari pihak aparat pemerintah (DLH, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan) terkait pengelolaan sampah di kecamatan nganjuk sudah mengarah pada sikap peduli akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, perilaku yang bertanggungjawab dengan mengawal dan mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah dengan metode 3R (Reduce, Recycle, Re-Use). Sedangkan dari sisi warga ditemukan fakta yang beragam terkait diberlakukannya Perda pengelolaan sampah ini. Sedangkan dalam aspek system approach menunjukkan fakta bahwa implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Nganjuk sudah cukup jelas dalam aspek regulasinya mengacu pada PERDA Nganjuk nomor 01 tahun 2015. Sedangkan aspek networking approach menunjukkan fakta bahwa kemitraan strategis dalam implementasi Kebijakan pengelolaan sampah terlihat pada adanya titik temu kepentingan antara pihak pemerintah kabupaten melalui DLH, pemerintah kecamatan melalui kelurahan- kelurahan yang ada dan masyarakat melalui keberadaan bank sampah yang tersebar di seluruh Desa.kelurahan di wilayah Kecamatan Nganjuk. Meskipun belum menunjukkan sinergitas dan simbiosis mutualisme yang maksimal. Dalam penelitian berjudul “Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia”, Addahlawi, H. A., Mustaghfiroh, U., Ni'mah, L. K., Sundusiyah, A., & Hidayatullah, A. F. (2020) mengungkapkan bahwa *Good Environmental Governance (Tata Kelola Lingkungan yang Baik)* adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal ini dilakukan dengan cara mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah. Pengelolaan sampah yang baik diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 dan PP Nomor 16 Tahun 2005. Setiap daerah memiliki cara tersendiri dalam mengelola sampah, seperti daur ulang, bank sampah, dan sanitary landfill. Pengelolaan sampah yang baik adalah tanggung jawab bersama dan harus dilakukan secara berkelanjutan.

Deby Artha, A., Nurasa, H., & Candradewini, C. (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat: Melihat Peluang dan Inovasi Kebijakan” ingin mengetahui siapa *stakeholder* yang berkolaborasi dalam pengelolaan sampah, menganalisis kolaborasi yang terbangun antar stakeholder, dan mengoptimalkan peluang dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan sampah. Dalam pengelompokan stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi, peneliti menggunakan metode pemetaan power- interest grid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder yang berkolaborasi terdiri dari: Bupati, DPRD, DLH, Pemerintah Nagari, DPMN, masyarakat, swasta, dan LSM. Kolaborasi sebagai konsep dasar penguat dari sinergitas dalam implementasi kebijakan yang terbangun antar stakeholder belum efektif. Perlu memanfaatkan dan mengoptimalkan peluang kolaborasi antar dan/atau dengan stakeholder lain.

Dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Kelurahan Sukarami Implementation of Waste Management Policy Through the Waste Bank Program in Sukarami district”, Mahendra, T., Syaputra, R., Wulandari, U, et al (2023) mengemukakan bahwa berdasarkan temuan yang digunakan, proses penerapan kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kecamatan Sukarami secara umum mencakup aspek tanggung jawab, aspek keberlanjutan, aspek keuntungan dan aspek makroekonomi, sehingga disimpulkan bahwa aspek nilai ekonomi termasuk di dalamnya. Meskipun belum dilaksanakan secara efektif, terdapat keterbatasan



fasilitas TPA, keterbatasan sumber daya manusia, gaji yang belum dibayarkan, dan minimnya pengawasan pemerintah terhadap TPA. Kendala masih ada. Faktor penentu keberhasilan penerapan kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah. Hal ini mencakup tingkat kepatuhan, kelancaran fungsi operasional sehari-hari, dan kinerja. Secara keseluruhan, faktor-faktor seperti kurangnya sosialisasi, kurangnya pelatihan, dan perlunya perbaikan sarana dan prasarana belum dilaksanakan secara optimal untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari pembangunan, sistem perbankan sampah itu sendiri. Melalui analisis teori model implementasi Syahrul Mubarak, dkk. (2020), Adnyana, Y., Sulandari, Sri, Astawa, IW menyatakan dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Payakumbuh” implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 3 aspek: isi kebijakan, konteks kebijakan dan proses kebijakan. Menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber. Simpulan, 1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 tahun 2019 sudah terimplementasi di Desa Penatih Daging Puri namun belum optimal. 2) Kendala dalam implementasi Peraturan Gubernur Bali nomor 47 tahun 2019 diantaranya: komunikasi, sumberdaya dan struktur birokrasi. Yang terakhir, penelitian berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui Program Bank Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango” oleh Abdussamad, J., Tui, F.P., Mohamad, F., & Dunggio, S. (2022) mengemukakan bahwa proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango meliputi, aspek tanggung jawab, aspek berkelanjutan, aspek manfaat, aspek nilai ekonomi secara keseluruhan pada umumnya telah dilakukan dengan baik, tetapi belum efektif dilaksanakan, masih terdapat kendala seperti keterbatasan bangunan bank sampah, keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya penggajian, serta minimnya pengawasan pihak pemerintah terhadap bank sampah. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah yang meliputi tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi, dan kinerja. Secara keseluruhan faktor-faktor tersebut belum dilakukan dengan maksimal seperti kurangnya sosialisasi, kurangnya pelatihan dan perlunya peningkatan mengenai sarana dan prasarana, sehingga dapat terpenuhi sesuai dengan harapan dari tujuan sistem bank sampah itu sendiri.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat beserta faktor penghambat dan upayanya dalam mengatasi permasalahan dalam prosesi implementasi kebijakan tersebut.

#### **1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung masih terhambat oleh beberapa faktor unik, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, minimnya pengetahuan, keterbatasan fasilitas, anggaran minim, partisipasi swasta yang kurang, dan kerjasama antar pihak yang masih lemah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang fokus pada daerah lain, penelitian ini memberikan rekomendasi yang lebih spesifik untuk Kota Bandung, seperti meningkatkan sosialisasi, memperkuat kerjasama, dan menambah anggaran. Kontribusi baru penelitian ini terletak pada identifikasi faktor penghambat yang unik, rekomendasi yang lebih spesifik, dan pemahaman yang lebih kaya tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan dan program pengelolaan sampah yang lebih efektif di Kota Bandung dan di Indonesia pada umumnya.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara

sistematis dan faktual tentang implementasi kebijakan penanggulangan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bandung. Mengacu pada teori Implementasi Kebijakan Marilee S. Grindle, penelitian ini mengeksplorasi dua dimensi utama, yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Data dikumpulkan melalui berbagai sumber primer dan sekunder, dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling untuk menentukan informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara semiterstruktur dan dokumentasi. Selanjutnya, data data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi, dianalisis menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017) yakni, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan sesuai jadwal akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun akademik 2023/2024, dengan lokasi penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Subbab ini akan mendeskripsikan hasil penelitian serta analisis hasil penelitian. Data yang didapatkan menggunakan tiga teknik pengumpulan data dijelaskan menggunakan teori Kebijakan Marilee S. Grindle meliputi dua dimensi yaitu isi kebijakan (*Content of policy*) dan lingkungan implementasi (*Context Of Implementation*). Kedua dimensi ini diukur menggunakan beberapa kriteria. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan Marilee S. Grindle.

#### **3.1. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat**

Penelitian ini mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung, Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Marilee S. Grindle yang mencakup dua dimensi: isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Landasan hukum penelitian ini adalah berbagai peraturan daerah dan nasional terkait pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil penelitian, isi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung cukup jelas dan komprehensif. Kebijakan ini mencakup strategi untuk mengurangi, menangani, dan mengembangkan kapasitas pengelolaan sampah, serta rancangan operasional untuk pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah. Program Kang Pisman, yang merupakan program unggulan Pemkot Bandung untuk pengelolaan sampah, menjadi fokus utama penelitian ini. Program Kang Pisman memiliki tujuan untuk mengurangi volume sampah, memisahkan sampah berdasarkan jenisnya, dan memanfaatkan sampah yang masih memiliki nilai guna. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Kang Pisman telah memberikan beberapa manfaat, seperti mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA, meningkatkan kualitas lingkungan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi program Kang Pisman, seperti kurangnya partisipasi masyarakat keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya pendanaan. Mekanisme pengambilan keputusan dalam program Kang Pisman melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, DPRD, LSM, sektor swasta, dan masyarakat. Mekanisme ini dilakukan melalui rapat koordinasi, partisipasi publik, dan evaluasi dan monitoring. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung masih terkendala oleh kurangnya sumber daya manusia yang terampil. Hal ini terlihat dari banyaknya lembaga swadaya masyarakat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, namun masih kekurangan tenaga terampil. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan individu pun menjadi faktor penghambat pelaksanaan program secara maksimal. Meskipun terdapat 163 armada pengangkutan sampah, jumlah tersebut masih dirasa kurang untuk menampung volume sampah di Kota Bandung. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar program pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung masih dalam tahap awal. Meskipun program Kang Pisman telah memberikan beberapa manfaat, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi agar program ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam Konteks Implementasi, menurut Marilee S. Grindle, perhatian harus diberikan pada kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat dalam implementasi program. Di Kota Bandung, kebijakan



Program Kang Pisman bertujuan mengurangi volume sampah melalui sosialisasi dan pengelolaan sampah. Hasil wawancara menunjukkan pentingnya kekuasaan dalam merumuskan kebijakan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan penyuluh lingkungan bertanggung jawab dalam menentukan dan melaksanakan prioritas masalah terkait sampah, dengan upaya penyuluhan dan pengumpulan data yang akurat untuk perumusan kebijakan yang efektif. Program Kang Pisman melibatkan pengelolaan sampah dari sumber hingga pengolahan akhir dengan langkah-langkah pemilahan, pengumpulan, dan transportasi. Sampah organik diolah menjadi kompos atau biogas, sedangkan sampah anorganik didaur ulang. Ada pula penanganan khusus untuk sampah B3. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh DLHK dengan dukungan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas program. Evaluasi program melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung berperan penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Wawancara menunjukkan bahwa ketegasan dan pemantauan adalah kunci keberhasilan program. DLHK bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengkoordinasikan upaya pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan nasional dan daerah. Masyarakat juga berperan aktif dalam mendukung program ini melalui partisipasi dalam kegiatan pemilahan sampah dan pemberian masukan untuk perbaikan kebijakan.

### **3.2. Faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat**

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung masih terhambat oleh beberapa faktor, di antaranya kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan minimnya pemanfaatan bank sampah, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik dan manfaat bank sampah, keterbatasan fasilitas seperti tempat sampah pilah dan armada pengangkut sampah, minimnya anggaran untuk program Kang Pisman, kurangnya partisipasi pihak swasta dalam pengelolaan sampah, dan kurangnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih maksimal dari berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, menambah fasilitas, dan meningkatkan anggaran untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Bandung. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangatlah penting untuk mencapai pengelolaan sampah yang optimal di Kota Bandung.

### **3.3. Upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah, seperti peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang diwujudkan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi melalui seminar, workshop, penyebaran brosur, dan kampanye di media sosial, memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya pengelolaan sampah dan kebijakan yang sudah ditetapkan, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah dan program Kang Pisman. Yang kedua, melalui penguatan dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak yang diwujudkan melalui kerjasama dengan pemerintah provinsi, swasta, dan lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan program pengelolaan sampah, melakukan kolaborasi antar pihak untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, dan membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Upaya yang terakhir, yaitu pemantauan dan Evaluasi Berkala Terhadap Jumlah Sampah dengan melakukan pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan kebijakan dan standar yang ditetapkan dipatuhi, penegakkan hukum terhadap pelanggaran kebijakan, evaluasi efektivitas program dan upaya yang dilakukan, dan peningkatan jumlah Kawasan Bebas Sampah (KBS) di Kota Bandung. Upaya-upaya ini diharapkan dapat membantu mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan mencapai tujuan program, yaitu menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dan

berkelanjutan di Kota Bandung.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian ini mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung menggunakan teori Implementasi Kebijakan Marilee S. Grindle yang mencakup dua dimensi: isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung cukup jelas dan komprehensif, dengan program Kang Pisman sebagai fokus utama. Program ini telah memberikan manfaat seperti pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPA, peningkatan kualitas lingkungan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah. Namun, masih terdapat tantangan seperti kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan infrastruktur, dan pendanaan. Implementasi kebijakan ini melibatkan berbagai pihak dan dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi, partisipasi publik, serta evaluasi dan monitoring. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung berperan penting dalam mengoordinasikan upaya ini, meskipun masih terkendala oleh kurangnya sumber daya manusia terampil dan fasilitas pendukung. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan ini termasuk peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, penguatan kerjasama dengan berbagai pihak, serta pemantauan dan evaluasi berkala terhadap jumlah sampah. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung masih dalam tahap awal dan memerlukan peningkatan agar lebih efektif dan berkelanjutan.

## **IV. KESIMPULAN**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan penelitian tersebut, disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pengetahuan masyarakat, kurangnya kepatuhan, dan kurangnya daya tangkap pelaksana. Selain itu, faktor lain yang menghambat adalah kurangnya rasa peduli masyarakat dengan kebersihan lingkungan, minimnya pengetahuan masyarakat terkait manfaat bank sampah, dan kurangnya kerja sama masyarakat untuk dapat mengatasi masalah sampah secara bersama-sama. Kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk program Kang Pisman tersebut dan Kurang memadai fasilitas untuk pengangkutan sampah dari setiap daerahnya menuju TPA Regional Sarimukti juga turut menghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat serta mengevaluasi secara berkala terhadap jumlah timbunan sampah. Penelitian ini juga memberikan saran agar dilakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin, dilaksanakan pembinaan, sosialisasi, dan penyuluhan rutin kepada masyarakat, serta pengembangan fasilitas yang memadai seperti pembangunan bank sampah pada setiap kecamatan dan perbanyak TPS kecil. **Keterbatasan Penelitian:** Keterbatasan dalam penelitian ialah waktu dan lokasi penelitian, sehingga masih belum dapat menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Kota Bandung. **Arah Masa Depan Penelitian:** Peneliti menyadari belum banyak yang membahas objek penelitian serupa, sehingga ke depannya agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan dengan metode yang lebih disempurnakan lagi.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian.



## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, J., Tui, F.P., Mohamad, F., & Dunggio, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik. Abror, M. D., & Probojati, R. T. (2023). Model MSN Approach dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 7(2), 148–157. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/negara/article/view/6913>
- Addahlawi, H. A., Mustaghfiroh, U., Ni'mah, L. K., Sundusiyah, A., & Hidayatullah, A. F. (2020). Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia. *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*, 8(2), 106–118. <https://doi.org/10.21009/jgg.082.04>
- Artha, A. D., Nurasa, H., & Candradewini, C. (2023). Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat: Melihat Peluang dan Inovasi Kebijakan. *Matra Pembaruan*, 7(1), 25–36. <https://doi.org/10.21787/mp.7.1.2023.25-36>
- Cahyadi, A., Sriati, & Fatih, A. Al. (2017). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah di Kabupaten Purbalingga. *Demography Journal of Sriwijaya (DeJoS)*, 2(2), 20–24.
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey : Princeton University Press.
- Hastuti, B. D., Anwar, F., & Titi, T. D. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2(2), 92–101. <https://doi.org/10.33830/jiapi.v2i2.70>
- Mahendra, T., Syaputra, R., Wulandari, U., Sari, S. P., Lestari, S., Prantia, S., & Utpalasari, R. L. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Kelurahan Sukarami Implementation of Waste Management Policy Through the Waste Bank Program in Sukarami Distric. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(6), 1852–1861.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications.
- Mokodompis, Y., Kaunang, M., & Kasenda, V. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–10.
- Okhtafianny, T., & Ariani, R. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Payakumbuh. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 3(2), 537–550. <https://doi.org/10.47709/jebma.v3i2.2837>
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9. (2018). *tentang Pengelolaan Sampah*. Bandung: Pemerintah Daerah.
- Peraturan Walikota Bandung Nomor 127. (2022). *tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerjasama Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah*. Bandung: Pemerintah Daerah.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 18. (2008). *Tentang Pengelolaan Sampah*. Jakarta: Pemerintah Pusat.

Yulistia, G., Suryaningsih, M., & Rostyaningsih, D. (2015). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 4(3), 1–11. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v4i3.8774>

